



PERLINDUNGAN SOSIAL

Bansos Tunai APBD Jogja Segera Dicairkan

UMBULHARJO—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja segera mencairkan dana bantuan sosial tunai (BST) untuk warga miskin yang terdampak Covid-19. Bantuan sosial tunai yang bersumber dari APBD Jogja tersebut ditarget cair bulan ini.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jogja, Maryustion Tonang mengatakan penerima BST APBD Jogja 2021 adalah keluarga yang tidak terakomodasi dalam Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang jumlahnya sekitar 2.000-an.

Dia berharap BST yang bersumber dari APBD tersebut bisa segera dicairkan bulan ini setelah regulasinya selesai, mengingat Pemerintah Pusat juga sudah mencairkannya bulan ini. "Harapannya regulasinya secepatnya selesai Maret ini, karena BST dari Pusat sudah jalan disalurkan, paling tidak *mengayem-ayemi* [menenangkan] masyarakat yang berhak menerima bantuan, membantu pemulihan

Kalau regulasinya tidak kuat nanti bisa menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Maryustion Tonang
Kepala Dinsosnakertrans Jogja

di masa pandemi," kata Maryustion, Minggu (14/3).

Maryustion mengatakan regulasi pencairan masih dibahas karena ada perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait dengan hibah bansos tunai. Perubahan regulasi tersebut diakuinya cukup signifikan sehingga perlu ada penyesuaian melalui Peraturan Wali Kota (Perwal).

Perubahan itu adalah mulanya dana hibah bansos tersentralisasi melalui penganggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait lainnya, hanya sebatas pelaksana teknis. Namun belakangan melalui Permendagri yang baru pos anggaran hibah bansos diserahkan melalui OPD terkait, untuk Jogja adalah Dinsosnakertrans.

"Kami bukan bicara lambat atau tidak tapi lebih kepada aspek legalitasnya, jangan sampai apa yang kami lakukan awalnya niatnya baik tapi kalau regulasinya tidak kuat nanti bisa menimbulkan persoalan di kemudian hari," ujar Maryustion.

Namun untuk nominal bansos tunai, kata dia, dipastikan tidak berubah atau disamakan nominalnya dengan bantuan sosial tunai dari Pemerintah Pusat, yakni Rp1,2 juta. Hanya mekanisme penyalurannya yang berbeda. Pemerintah Pusat menyalurkan bansos 3xRp400.000. Sementara Pemerintah Kota Jogja menyalurkannya sebanyak enam kali dengan jumlah Rp200.000 per satu kali kirim. (Ujang Hasanudin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005